



Bupati Sampaikan Pertangjawab APBD 2014 Ketapang Raih WTP

KETAPANG-RK. Bupati Ketapang Henrikus menyampaikan pengantar nota keuangan dan penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014, di ruang sidang paripurna DPRD, Senin (6/7).

Dalam sidang tersebut terungkap, kabupaten Ketapang mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK-RI, terkait pengelolaan keuangan

tahun anggaran 2014.

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Ketapang Budi Matheus S.Pd, didampingi Wakil-wakil Ketua DPRD Ketapang Jamhuri Amir SH dan Qadarini SE dan dihadiri Forkopimda serta Kepala SKPD.

Plt Sekda Drs H Mansyur yang membacakan pidato Bupati mengatakan penyampaian rancangan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2014 merupakan salah satu kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi oleh pihak eksekutif untuk disampaikan kepada DPRD tentang pelaksanaan APBD Kabupaten Ketapang tahun 2014.

"Rancangan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan tanggung jawab moral eksekutif selaku pemegang mandat pelaksanaan anggaran daerah," kata Mansyur.

Sebagaimana diatur dalam pasal 101 peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005, tentang

pengelolaan keuangan daerah dalam ditegaskan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang diperiksa oleh Badan pemeriksa keuangan (BPK) paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Kalbar telah melakukan pemeriksaan yang hasilnya disampaikan pada 3 Juli 2015 Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2014 mendapat pernyataan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

"Hal ini berarti bahwa Secara umum laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun anggaran 2014 telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai standar akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan," jelas Mansyur.

Gambaran umum realisasi

pendapatan realisasi belanja realisasi pembiayaan serta pencapaian kinerja keuangan daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2014.

Adapun realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2014, sebesar Rp.1.546.921.315.879.89.

Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2014 tersebut bersumber dari Pendapatan Asli daerah Dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tahun anggaran 2014 sebesar Rp.110.300.249.782.83 atau 112.67 persen dari target yang ditetapkan, PAD yang bersumber dari pajak daerah retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Realisasi dana perimbangan Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2014, sebesar Rp. 1.313.087.235.521.00

atau sebesar 99,44 persen dari target yang ditetapkan yang bersumber dari dana bagi hasil pajak dana bagi hasil bukan pajak dan alokasi umum dan dana alokasi khusus. Realisasi lain-lain pendapatan yang sah kabupaten Ketapang tahun anggaran 2014, sebesar Rp. 123.533.830.576.06.

Sementara realisasi belanja daerah tahun anggaran 2014, sebesar Rp1.577.793.986.138.48, yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 583.178.943.848 dan belanja langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yaitu belanja pegawai belanja barang dan jasa serta belanja modal sebesar Rp994.615.042.289.71.

Bidang pembiayaan daerah per 31 desember 2014. sebesar Rp184.127.419.067.52. Realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar enam milyar Rupiah. Sisa lebih perhitungan APBD Ketapang tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 147.254.748.808.94.

(Jay-Humas)